



Satuan Polisi Pamong Praja

- RENJA - P -

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan berkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No 54 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016– 2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. FIDA HURASANI, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	1
1	BAB I PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
2	BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD	8
	<i>Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	<i>Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	13
3	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1	Program dan Kegiatan	14
	<i>Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	15
4	BAB IV PENUTUP	16



1.1. LATAR BELAKANG

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja atau Renja SATPOL PP Tahun 2021 merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan.
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-13708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016– 2021;
14. Peraturan Bupati Kuti Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada satuan polisi pamong praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP di tahun 2021, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja SATPOL PP pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada umumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, RENSTA-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Meguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2019, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
(Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3709)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan. Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Tahun 2021, pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA), Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program, 10 kegiatan, dan 26 subkegiatan. Sesuai dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perubahan mendasar juga terjadi pada RENSTRA 2016-2021 SATPOL PP karena menyesuaikan dengan permendagri tersebut. Perubahan tersebut karena adanya sub kegiatan di dalam kegiatan. pada Dokumen RENSTRA 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 9 Program dan 41 kegiatan.

Tabel capaian kinerja SATPOL PP sampai semester 1 2021

OPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM					
Kode	Nama	Rupiah			% Pelaksanaan
		Alokasi	Realisasi	%	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,707,407,394	10,540,650,116	44.5 %	69.4 %
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,152,456,700	0	0.0 %	21.0 %
TOTAL		24,859,864,094	10,540,650,116	42.4 %	45.2 %

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program urusan rutin/generik SATPOL PP, terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Karena bersifat rutinitas, maka seluruh kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, terlihat dari persentase capaian pelaksanaan adalah sebesar 69.4 %, sedangkan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 44.5 %.

Catatan khusus yang harus diperhatikan adalah bahwa realisasi keuangan hanya berasal dari Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp 7.615.580.635);
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp 2,797,198,000) dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rp 51,537,401);
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp 76,334,080).

Kegiatan rutin/generik yang lain telah dilaksanakan dengan baik, hanya realisasi anggaran belum berjalan dengan karena perencanaan anggaran kas baru dapat direalisasikan pada semester 2 tahun 2021. Penyebab utama masalah ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga ketersediaan anggaran lebih fokus kepada penanganan pandemi tersebut.

Tabel realisasi kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kode	Nama	Rupiah			% Pelaksanaan
		Alokasi	Realisasi	%	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161,805,600	0	0.0 %	100.0 %
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,831,722,702	7,615,580,635	51.3 %	78.0 %
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60,020,000	0	0.0 %	25.0 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219,580,000	0	0.0 %	10.0 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220,291,700	0	0.0 %	85.0 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	508,396,600	0	0.0 %	45.0 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,253,181,792	2,848,735,401	39.3 %	100.0 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452,409,000	76,334,080	16.9 %	63.0 %
TOTAL		23,707,407,394	10,540,650,116	44.5 %	63.3 %

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum merupakan program utama SATPOL PP yang terdiri dari 2 kegiatan dan 6 subkegiatan.

Tabel kegiatan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kode	Nama	Rupiah			% Pelaksanaan
		Alokasi	Realisasi	%	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	712,186,800	0	0.0 %	29.0 %
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	440,269,900	0	0.0 %	5.0 %
TOTAL		1,152,456,700	0	0.0 %	17.0 %

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kinerja program utama SATPOL PP tidak berjalan dengan maksimal, baik kinerja pelaksanan maupun realisasi anggaran. Capaian pelaksanaan terbesar hanya dari subkegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (55%), sedangkan subkegiatan lain hanya sekitar 25% (baru sampai tahap perencanaan pelaksanaan).

Tabel kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	55.0 %
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	11.0 %

Bahkan pada kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang terdiri 2 subkegiatan hanya dapat dijalankan sampai pada tahap perencanaan awal (5%).

Tabel Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kode	Nama	Kelengkapan												%
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.0 %
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.0 %

Penyebab utama Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal adalah seluruh sumber daya SATPOL PP baik manusia maupun sarapa prasarana, seluruhnya dikerahkan untuk penanganan Pandemi COVID-19. SATPOL PP menjadi bagian dari 3 pilar utama penanganan COVID-19 dalam bidang penegakan hukum bersama dengan TNI dan POLRI.

Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dengan pencapaian RENSTRA SKPD.

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kutai Kartanegara
(Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3709)

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
							Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1 05 02 2.01	I	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1 05 02 2.01 01		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pengawalan & Pengamanan	2190 kegiatan	8257 kegiatan	500 kegiatan	179 kegiatan	36%		8436 kegiatan	385%
1 05 02 2.01 03		2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama	46 dokumen	22 dokumen	7 dokumen	0 dokumen	0%	rencana kegiatan mulai Juli 2021	22 dokumen	48%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
							Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
05 02 2.01 04		3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu	109 regu	64 regu	25 regu	0 regu	0%	rencana kegiatan mulai Juli 2021	64 regu	59%
1 05 02 2.01 05		4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	420 orang	210 orang	300 orang	0 orang	0%	rencana kegiatan mulai Juli 2022	210 orang	50%
1 05 02 2.02	II	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										
1 05 02 2.02 02		5	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pengawasan	1500 objek	1000 objek	54 objek	0 objek	0%	rencana kegiatan mulai Juli 2022	1000 objek	67%
1 05 02 2.02 03		6	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda	1501 Penegakan Perda	503 Penegakan Perda	25 Penegakan Perda	0 Penegakan Perda	0%	rencana kegiatan mulai Juli 2023	503 Penegakan Perda	34%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
							Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1 05 01 2.01	III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat										
1 05 01 2.01 06		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	21 dokumen	16 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%		21 dokumen	100%
1 05 01 2.02	IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1 05 01 2.02 01		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	48 bulan	12 bulan	6 bulan	50%		54 bulan	90%
1 05 01 2.02 07		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah orang	1250 orang	1000 orang	250 orang	120 orang	48%		1120 orang	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)		
						Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1 05 01 2.03	V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat										
1 05 01 2.03 05		10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	40 orang	32 orang	8 orang	0 orang	0%		32 orang	80%
1 05 01 2.05	VI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1 05 01 2.05 02		11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah perlengkapan pakaian dinas	1356 stel	496 stel	110 stel	0 stel	0%		496 stel	37%
1 05 01 2.05 03		12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%		0 dokumen	0%
1 05 01 2.06	VII	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1 05 01 2.06 02		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Alat Tulis Yang Diadakan	335 jenis	172 jenis	28 jenis	0 jenis	0%		172 jenis	51%
1 05 01 2.06 02		14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik	15 paket	12 paket	3 paket	0 paket	0%		12 paket	80%
1 05 01 2.06 05		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	27 jenis	20 jenis	7 jenis	0 jenis	0%		20 jenis	74%
1 05 01 2.06 09		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan LuarDaerah	9977 orang	500 orang	225 orang	25 orang	11%		525 orang	5%
05 01 2.06 10		17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah	2000 arsip	0 arsip	1000 arsip	0 arsip	0%		0 arsip	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
							Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 05 01 2.07	VIII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1 05 01 2.07 02		18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan	4 unit	2 unit	1 unit	0 unit	0%		2 unit	50%
1 05 01 2.07 05		19	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	20 unit	7 unit	3 unit	unit	0%		7 unit	35%
1 05 01 2.07 10		20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	275 unit	154 unit	8 unit	0 unit	0%		154 unit	56%
1 05 01 2.08	IX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1 05 01 2.08 01		21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai	11200 lembar	4100 lembar	365 lembar	0 lembar	0%		4100 lembar	37%
1 05 01 2.08 02		22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon dan Internet	20 rekening	16 rekening	8 rekening	8 rekening	100%		24 rekening	120%
1 05 01 2.08 03		23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di servis	725 unit	382 unit	145 unit	0 unit	0%		382 unit	53%
1 05 01 2.08 04		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	1356 orang	1086 orang	270 orang	270 orang	100%		1356 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegatan/SubKegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)		
						Target RENJA.PD tahun (2021)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1 05 01 2.09	X	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1 05 01 2.09 02		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil oprasional yang mendapat perawatan, Jumlah motor dinas yangmendapat perawatan	411 unit	332 unit	79 unit	0 unit	0%		332 unit	81%
1 05 01 2.09 09		26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5 gedung	5 gedung	2 gedung	0 gedung	0%		5 gedung	100%

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan	
					Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)		
1	2		3	4	5	(6=5/4*100)	7	8	(9=8/7)	10	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						24.859.864.094,00	10.540.650.116,00			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.152.456.700	-	0		
	I	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					712.186.800,00	-	-		
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pengawasan & Pengamanan	500 kegiatan	179 kegiatan	36%	495.698.000,00	-	-	kegiatan dijadwalkan dilaksanakan mulai juli - desember 2021 (anggaran kas)

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
		2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama	7 dokumen	0 dokumen	0%	23.483.300,00	-	-	
		3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu	25 regu	0 regu	0%	75.527.500,00	-	-	
		4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	300 orang	0 orang	0%	117.478.000,00	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
	II	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						440.269.900,00	-		
		5	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pengawasan	54 objek	0 objek	0%	127.767.500,00	-	-	kegiatan dijadwalkan dilaksanakan mulai juli - desember 2021 (anggaran kas)
		6	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda	25 Penegakan Perda	0 Penegaka n Perda	0%	312.502.400,00	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							23.707.407.394	10.540.650.116,00		
	III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat						161.805.600	-		
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	161.805.600	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
	IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.831.722.702	7.615.580.635,00		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6 bulan	50%	14.633.125.702	7.615.580.635,00	0,52	
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah orang	250 orang	120 orang	48%	198.597.000	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021
	V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat						60.020.000	-		
		10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	8 orang	0 orang	0%	60.020.000	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
	VI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						219.580.000	-		
		11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah perlengkap an pakaian	110 stel	0 stel	0%	200.000.000	-	-	
		12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	1 dokumen	0 dokumen	0%	19.580.000	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021
	VII	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.291.700	-		
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Yang	28 jenis	0 jenis	0%	89.216.400	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021
		14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik	3 paket	0 paket	0%	44.600.000	-	-	
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	7 jenis	0 jenis	0%	6.031.500	-	-	
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan LuarDaerah	225 orang	25 orang	11%	65.465.000	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Program / Keglatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
		17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah	1000 arsip	0 arsip	0%	14.978.800	-	-	
	VIII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						508.396.600	-		
		18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	0 unit	0%	350.570.000	-	-	kegiatan dijadwalkan dilaksanakan mulai juli - desember 2021 (anggaran kas)
		19	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	3 unit	unit	0%	31.543.600	-	-	
		20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	0 unit	0%	126.283.000	-	-	
	IX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.253.181.792	2.848.735.401,00		
		21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai	365 lembar	0 lembar	0%	4.015.000	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
		22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon dan Internet	8 rekening	8 rekening	100%	199.945.992	51.537.401,00	0,26	
		23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di servis	145 unit	0 unit	0%	25.550.000	-	-	
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	270 orang	270 orang	100%	7.023.670.800	2.797.198.000,00	0,40	
	X	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452.409.000	76.334.080,00		
		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil oprasional yang mendapat perawatan, Jumlah motor dinas yangmendapat at perawatan	79 unit	0 unit	0%	354.355.000	76.334.080,00	0,22	

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
						Realisasi RENJA-PD Triwulan II	tingkat Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
		26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 gedung	0 gedung	0%	98.054.000	-	-	pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, hanya anggaran kas dijadwalkan mulai bulan juli 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU). Indikator Kinerja Kunci (IKU) SATPOL PP dan target capaiannya tertuang dalam RENSTRA 2016-2021 yaitu :

No	IKU	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	BB	A
2	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP.	-	-	-	70	76	80
3	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	40%	60%	80%

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2021 sampa triwulan 2 untuk masing –masing indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator penilaian kinerja OPD yang biasa disebut LkjIP. Tahun 2020, capaian SATPOL PP adalah B .
2. Indikator Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. merupakan indikator yang diperoleh dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja SATPOL PP. Tahun 2020, dengan bekerja sama dengan Universitas Kutai Kartanegara, survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap SATPOL PP sebesar 76,89 .
3. Indikator Persentase Penegakan PERDA merupakan indikator yang diperoleh dengan cara mengukur perbandingan jumlah laporan kejadian yang diselesaikan dibagi jumlah laporan kejadian yang dilaporkan dikali 100%. Tahun 2020, Kasus trantibum sebesar 1362, dan keseluruhan kasus tersebut dapat diselesaikan seluruhnya.

Dalam tataran pengambilan kebijakan (IKK/Indikator Kinerja Kunci), SATPOL PP termasuk kedalam aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah dimana capaiannya difokuskan pada 2 hal yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dan Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk.

Capaian IKK pada tahun 2021 untuk masing –masing indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN* merupakan indikator yang diperoleh dengan cara mengukur jumlah perda pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah perda yang harus dilaksanakan menurut

PERMEN. Capaian IKK SATPOL PP adalah 100% dimana Perda pelaksanaan sebanyak 12 dan perda yang seharusnya sebanyak 12.

- 2. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk merupakan indikator yang diperoleh dengan cara menghitung jumlah personil SATPOL PP per 10.000 penduduk. Pada akhir tahun 2020, rasio capaian IKK SATPOL PP adalah 6.2 dimana jumlah personil SATPOL PP adalah 435 (270+165) orang.

Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020, capaian SATPOL PP adalah 100%. Indikator capain kinerja untuk SATPOL PP adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara. Tahun 2020, tidak ada pengaduan masyarakat akibat dari penegakan perha/perkada yang dilakukan oleh SATPOL PP.

Dalam pelaksanaan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan Penindakan Preventive non yustisial (Surat Teguran). Dibidang Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat ruang lingkupnya meliputi Pengamanan, tempat, aset daerah, Pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, Terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pejabat negara, daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak daerah, sumber PAD, serta objek vital daerah.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11	12	13
1	indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.			B	B	B	BB	BB	B	BB	BB	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat					70	76	80	76,89	80	82	
3	Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	40%	60%	80%	100%	60%	80%	1362 kasus yang diselesaikan dibagi dengan 1362 kasus yang dilaporkan/temuan anggota
4		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dalam melakukan penegakan pelanggaran perda, SATPOL PP tidak pernah mendapat pengaduan masyarakat atas kinerjanya.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
5			Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN						100%			
6			Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk						6,5			



3.1. Program dan Kegiatan

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “**Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan** “. Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, “Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat “, dengan Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dan sasaran Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha **untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana**. Berangkat dari sasaran Gerbang Raja II tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengemban tugas Keamanan dan Ketertiban Umum menetapkan program dan kegiatan.

Untuk tahun 2021, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan perubahan dan Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3709 , maka SATPOL PP merencanakan 2 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan.

Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap penegakan perda, maka kegiatan yang berhubungan dengan msyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertiban jalur hijau serta jalan utama dari PKL di kecamatan tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan perda seperti perda KTP, Perda Miras dan Perda Prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban Perijinan baik itu IMB maupun ijin usaha yang terfokus di kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. SATPOL PP juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3).

Disamping itu, SATPOL PP juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran renja satuan polisi pamong praja

- Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 :
 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
 2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah.

- Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 :
 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP.
 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan		Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.859.864.094				26.316.209.138	1.456.345.044		23.767.135.957
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.152.456.700				1.152.456.514			524.708.800
1 05 02 2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				712.186.800				712.186.614			524.708.800
1 05 02 2.01 01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pengawalan & Pengamanan	500 kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495.698.000	Jumlah pencegahan gangguan trantibum	500 kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495.697.814	-186	2.500 kali	325.698.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Sebelum Perubahan (APBD) Kependagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kependagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 02 2.01 03			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama	7 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.483.300	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.483.300	0	4 kali	23.483.300
05 02 2.01 04			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu	25 regu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.527.500	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 regu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.527.500	0	25 regu	75.527.500
1 05 02 2.01 05			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	300 orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.478.000	jumlah anggota SATPOL PP dan LINMAS yang mengikuti diklat penegakan perda	200 orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.478.000	0	200 orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Sebelum Perubahan (APBD) Kepermdagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepermdagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 02 2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					440.269.900				440.269.900			
1 05 02 2.02 02			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pengawasan	54 objek	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.767.500	Jumlah Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54 objek	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.767.500	0	300 kali	120.000.000
1 05 02 2.02 03			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda	25 Penegakan Perda	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312.502.400	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 Penegakan Perda	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312.502.400	0	300 kali	202.522.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan		Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.707.407.394				25.163.752.624			23.242.427.157
1 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				161.805.600				440.012.724			70.000.000
1 05 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161.805.600	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440.012.724	278.207.124	15 Dokumen	70.000.000
1 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.831.722.702				14.747.008.702			15.098.354.465
1 05 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Tenggarong	14.633.125.702	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 bulan	Tenggarong	14.633.125.702	0	1.980 orang/bulan	14.998.354.465
1 05 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah orang	260 orang	Tenggarong	198.597.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 dokumen	Tenggarong	113.883.000	-84.714.000	15 dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat					60.020.000				60.020.000			0
1 05 01 2.03 05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	8 orang	Tenggaro ng	60.020.000	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	8 orang	Tenggaro ng	60.020.000	0		
1 05 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					219.580.000				219.829.400			19.580.000
1 05 01 2.05 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah perlengkapan pakaian dinas	110 buah	Tenggaro ng	200.000.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya yang diadakan	110 buah	Tenggaro ng	182.000.000	-18.000.000		
1 05 01 2.05 03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	1 dokumen	Tenggaro ng	19.580.000	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 dokumen	Tenggaro ng	37.829.400	18.249.400	10 dokum en	19.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan		Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.291.700				290.785.200			211.075.300
1 05 01 2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Yang Diadakan	28 jenis	Tenggaro ng	89.216.400	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkap a n Kantor yang disediakan	28 jenis	Tenggaro ng	89.216.400	0	67 jenis 80.000.000
1 05 01 2.06 02			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik	3 paket	Tenggaro ng	44.600.000	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	21 jenis	Tenggaro ng	100.355.000	55.755.000	21 jenis 44.600.000
1 05 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak an	7 jenis	Tenggaro ng	6.031.500	Jumlah Barang Cetak an dan Pengganda a n yang disediakan	7 jenis	Tenggaro ng	7.830.000	1.798.500	7 jenis 6.031.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan		Sebelum Perubahan (APBD) Kepermendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepermendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif	
1 05 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				508.396.600				615.345.290			157.826.600	
1 05 01 2.07 02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	Tenggarong	350.570.000	Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	1 unit	Tenggarong	351.678.430	1.108.430		
1 05 01 2.07 05			Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur	3 unit	Tenggarong	31.543.600	Jumlah mebel kantor yang tersedia	3 unit	Tenggarong	39.807.000	8.263.400	3 unit	31.543.600
1 05 01 2.07 10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	Tenggarong	126.283.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	14 unit	Tenggarong	223.859.860	97.576.860	8 unit	126.283.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.253.181.792				8.312.430.308			7.253.181.792
1 05 01 2.08 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai	365 lembar	Tenggaring	4.015.000	Jumlah surat menyurat	12 bulan	Tenggaring	7.150.000	3.135.000	12 bulan	4.015.000
1 05 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpn dan Internet	8 rekening	Tenggaring	199.945.992	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Tenggaring	117.536.994	-82.408.998	12 bulan	199.945.992
1 05 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di servis	145 unit	Tenggaring	25.550.000	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Tenggaring	34.090.000	8.540.000	12 bulan	25.550.000
1 05 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	270 orang	Tenggaring	7.023.670.800	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 bulan	Tenggaring	8.153.653.314	1.129.982.514	12 1.bulan 2. bulan	7.023.670.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan			Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1 05 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					452.409.000				478.321.000			432.409.000
1 05 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil oprasional yang mendapat perawatan , Jumlah motor dinas yangmend apat perawatan	79 unit	Tenggaro ng	354.355.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatka n Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak	81 unit	Tenggaro ng	406.672.000	52.317.000	81 unit	354.355.000
1 05 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 gedung	Tenggaro ng	98.054.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara / direhabilitasi	2 gedung	Tenggaro ng	71.649.000	-26.405.000	2 unit	78.054.000



Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA Perubahan) disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Produk hukum daerah, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA Perubahan) ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2016 - 2021.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RENJA SATPOL PP tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;
2. Perubahan RENJA SATPOL PP tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
3. Perubahan RENJA SATPOL PP tahun 2021, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra SATPOL PP) ;
4. Perubahan RENJA SATPOL PP tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya ;

Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar RENJA Perubahan SATPOL dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal adalah :

1. Perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan ;
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur SATPOL PP untuk melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur SATPOL PP;
3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan penegakan perda/perkada ;
4. Perlu peningkatan koordinasi dengan OPD terkait penyelenggaraan pelayanan penegakan perda/perkada ;

Meskipun Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA Perubahan) ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA Perubahan) ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA Perubahan) ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi Kabupaten Kutai Kartanegara **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan “** dapat tercapai.

Tenggarong, 4 Agustus 2021
Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Satuan



H. Fida Hurasani S.Sos
19731101 200012 1 003